

Sabtu, 19 Desember 2009

Artikel: Pendidikan Luar Sekolah

Kita menyadari bahwa SDM kita masih rendah, dan tentunya kita masih punya satu sikap yakni optimis untuk dapat mengangkat SDM tersebut. Salah satu pilar yang tidak mungkin terabaikan adalah melalui pendidikan non formal atau lebih dikenal dengan pendidikan luar sekolah (PLS).

Seperti kita ketahui, bahwa rendahnya SDM kita tidak terlepas dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, terutama pada usia sekolah. Rendahnya kualitas SDM tersebut disebabkan oleh banyak hal, misalnya ketidakmampuan anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sebagai akibat dari kemiskinan yang melilit kehidupan keluarga, atau bisa saja disebabkan oleh angka putus sekolah, hal yang sama disebabkan oleh factor ekonomi

Oleh sebab itu, perlu menjadi perhatian pemerintah melalui semangat otonomi daerah adalah mengerjakan program pendidikan non formal tersebut, karena UU Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara lugas dan tegas menyebutkan bahwa pendidikan non formal akan terus ditumbuhkembangkan dalam kerangka mewujudkan pendidikan berbasis masyarakat, dan pemerintah ikut bertanggungjawab kelangsungan pendidikan non formal sebagai upaya untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun.

Dalam kerangka perluasan dan pemerataan PLS, secara bertahap dan bergukir akan terus ditingkatkan jangkauan pelayanan serta peran serta masyarakat dan pemerintah daerah untuk menggali dan memanfaatkan seluruh potensi masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan PLS, maka Rencana Strategis baik untuk tingkat propinsi maupun kabupaten kota, adalah :

1. Perluasan pemerataan dan jangkauan pendidikan anak usia dini;
2. Peningkatan pemerataan, jangkauan dan kualitas pelayanan Kejar Paket A setara SD dan B setara SLTP;
3. Penuntasan buta aksara melalui program Keaksaraan Fungsional;
4. Perluasan, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan perempuan (PKUP), Program Pendidikan Orang tua (Parenting);
5. Perluasan, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan berkelanjutan melalui program pembinaan kursus, kelompok belajar usaha, magang, beasiswa/kursus; dan
6. Memperkuat dan memandirikan PKBM yang telah melembaga saat ini di berbagai daerah di Riau.

Dalam kaitan dengan upaya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, maka program PLS lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, tanpa mengesampingkan aspek akademis. Oleh sebab itu Program PLS mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalitas, produktivitas, dan daya saing dalam merebut peluang pasar dan peluang usaha, maka yang perlu disusun Rencana strategis adalah :

1. Meningkatkan mutu tenaga kependidikan PLS;
2. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana dapat memperluas pelayanan PLS, dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil;
3. Meningkatkan pelaksanaan program kendali mutu melalui penetapan standard kompetensi, standard kurikulum untuk kursus;
4. Meningkatkan kemitraan dengan pihak berkepentingan (stakholder) seperti Dudi, asosiasi profesi, lembaga diklat; serta

5. Melaksanakan penelitian kesesuaian program PLS dengan kebutuhan masyarakat dan pasar. Demikian pula kaitan dengan peningkatan kualitas manajemen pendidikan.

Strategi PLS dalam rangka era otonomi daerah, maka rencana strategi yang dilakukan adalah :

1. Meningkatkan peranserta masyarakat dan pemerintah daerah;
2. Pembinaan kelembagaan PLS;
3. Pemanfaatan/pemberdayaan sumber-sumber potensi masyarakat;
4. Mengembangkan sistem komunikasi dan informasi di bidang PLS;
5. Meningkatkan fasilitas di bidang PLS

Semangat Otonomi Daerah PLS memusatkan perhatiannya pada usaha pembelajaran di bidang keterampilan lokal, baik secara sendiri maupun terintegrasi. Diharapkan mereka mampu mengoptimalkan apa yang sudah mereka miliki, sehingga dapat bekerja lebih produktif dan efisien, selanjutnya tidak menutup kemungkinan mereka dapat membuka peluang kerja. Pendidikan Luar Sekolah menggunakan pembelajaran bermakna, artinya lebih berorientasi dengan pasar, dan hasil pembelajaran dapat dirasakan langsung manfaatnya, baik oleh masyarakat maupun peserta didik itu sendiri..

Di dalam pengembangan Pendidikan Luar Sekolah, yang perlu menjadi perhatian bahwa, dalam usaha memberdayakan masyarakat kiranya dapat membaca dan merebut peluang dari otonomi daerah, pendidikan luar sekolah pada era otonomi daerah sebenarnya diberi kesempatan untuk berbuat, karena mustahil peningkatan dan pemberdayaan masyarakat menjadi beban pendidikan formal saja, akan tetapi pendidikan formal juga memiliki tanggungjawab yang sama. Oleh sebab itu sasaran Pendidikan Luar Sekolah lebih memusatkan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikanberkelanjutan, Selanjutnya Pendidikan Luar Sekolah harus mampu membentuk SDM berdaya saing tinggi, dan sangat ditentukan oleh SDM muda (dini), dan tepatlah Pendidikan Luar sekolah sebagai alternative di dalam peningkatan SDM ke depan.

PLS menjadi tanggungjawab masyarakat dan pemerintah sejalan dengan Pendidikan Berbasis Masyarakat, penyelenggaraan PLS lebih memberdayakan masyarakat sebagai perencana, pelaksanaan serta pengendali, PLS perlu mempertahankan falsafah lebih baik mendengar dari pada didengar, Pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota secara terus menerus memberi perhatian terhadap PLS sebagai upaya peningkatan SDM, dan PLS sebagai salah satu solusi terhadap permasalahan masyarakat, terutama anak usia sekolah yang tidak mampu melanjutkan pendidikan, dan anak usia putus sekolah..Semoga.

TUJUAN PLS

Secara umum Jurusan PLS bertujuan untuk menghasilkan tenaga-tenaga ahli kependidikan Strata 1 (S1, gelar sarjana kependidikan) yang mampu mengelola berbagai program pendidikan luar sekolah, baik yang diselenggarakan pada berbagai instansi pemerintah, lembaga-lembaga kerja swasta (perusahaan), dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Sesuai dengan visi dan misi tersebut, tujuan dari Jurusan Pendidikan Luar Sekolah adalah menghasilkan lulusan yang :

- a. Menguasai bidang keahlian yang mencakup penguasaan konsep ilmu yang melandasi pendidikan luar sekolah, menguasai substansi bidang keahlian dan mampu mengaplikasikannya bagi memecahkan permasalahan pendidikan sesuai dengan konteksnya

dan mengembangkan keahlian pendidikan luar sekolah.

b. Menenal peserta didik yang mencakup kemampuan mengidentifikasi kebutuhan belajar, menenal karakteristik, potensi dan membimbing pengembangan karier peserta didik serta menguasai cara dan gaya belajarnya.

c. Menguasai pembentukan dan pengelolaan satuan/program pendidikan luar sekolah yang mencakup kemampuan merancang dan membentuk satuan pendidikan luar sekolah, mengidentifikasi sumber belajar, mengorganisir komponen satuan, melaksanakan program, memonitor dan mengevaluasi program pendidikan luar sekolah serta kemampuan mengembangkan inovasi-inovasi program dan bentuk penyelenggaraan pendidikan luar sekolah

d. Menguasai pembelajaran yang mendidik pada jalur pendidikan luar sekolah yang mencakup kemampuan merancang pembelajaran yang mendidik, mengembangkan bahan belajar, menguasai pendekatan, metode dan media pembelajaran melaksanakan pembelajaran yang mendidik, melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar peserta didik, melaksanakan penelitian dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran serta mengelola dan memanfaatkan laboratorium untuk memperkuat pengalaman belajar

e. Mampu mengembangkan kepribadian dan keprofesionalan pendidikan luar sekolah yang mencakup kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja bekerja mandiri dan dalam kemitraan, menguasai pemanfaatan sumber-sumber baru untuk mengembangkan keahliannya memiliki komitmen terhadap profesi dan tugas professional serta peningkatan diri dalam kinerja profesinya.

SEJARAH RINGKAS TENTANG PLS

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) merupakan salah satu jurusan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada mulanya jurusan ini bernama Jurusan Pendidikan Sosial (tahun 1961) dimana jurusan ini muncul pada periode FKIP Unand Padang (1958-1964). Tahun 1979 Jurusan Pendidikan Sosial berganti nama menjadi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah dan berlanjut sampai sekarang.

Jurusan PLS menyiapkan tenaga ahli kependidikan luar sekolah yang bidang garapannya sangat luas, antara lain sebagai pengelola berbagai kegiatan pendidikan dan latihan baik pada instansi pemerintah, swasta (perusahaan), lembaga-lembaga swadaya masyarakat, pengelola kursus-kursus, pembina generasi muda, penyuluh pada berbagai kegiatan penyuluhan dan pengelola serta tenaga pendidik program layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pada Tahun 2005 Jurusan PLS membuka Konsentrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai sekarang, yang tempat kuliahnya di Kampus UNP Air Tawar Padang dan Kampus UPP Bukittinggi.

Visi

Terwujudnya jurusan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam memenuhi kebutuhan belajar masyarakat.

Misi

-
1. Menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan andragogis dan dengan pengalaman belajar yang konprehensif
 2. Mengembangkan model pengelolaan dan pelayanan belajar PLS
 3. Melaksanakan penelitian dan pengembangan PLS

4. Menyediakan layanan informasi, konsultasi dan kerja sama dibidang PLS
5. Menghasilkan produk-produk pembelajaran PLS
6. Menghasilkan karya ilmiah kependidikan Luar Sekolah

KURSUS: Pendidikan Luar Sekolah

Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan bersinambungan. Satuan pendidikan luar sekolah meliputi kursus/lembaga pendidikan ketrampilan dan satuan pendidikan yang sejenis.

Di tengah krisis ekonomi seperti sekarang, kursus/lembaga pendidikan ketrampilan ini barangkali harus lebih dikedepankan. Kegiatan kursus bukan hanya memberi harapan pada anak putus sekolah yang sulit mencari kerja tetapi juga memberikan jalan bagi banyaknya jumlah lulusan SLTA yang tak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sehingga lembaga kursus selalu mendapat tempat. Di tangan para pengelolanya, lembaga pendidikan ini bisa bergerak cepat mengikuti irama perkembangan dan tuntutan yang terjadi di masyarakat.

Begitu cepatnya antisipasi yang dilakukan para penyelenggara kursus atas tuntutan masyarakat, sangat boleh jadi, lembaga pendidikan nonformal ini tidak begitu berat terkena pukulan akibat krisis ekonomi. Menurut mereka, lulusan SMTA yang akan memasuki perguruan tinggi perlu berpikir ulang, baik mengenai biaya maupun lama waktu belajar yang harus ditempuh. Apalagi, setelah selesai kuliah, para lulusan perguruan tinggi pun belum tentu mudah mendapatkan pekerjaan.

Meski kursus masih dipandang sebelah mata, anak tiri dalam sistem pendidikan di Indonesia itu kini telah tumbuh menjadi sebuah bidang usaha yang nyaris tanpa batas. Tidak sedikit perguruan tinggi swasta bercikal bakal dari kursus. Lembaga-lembaga kursus di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir tumbuh sangat pesat dan berkembang menjadi industri mimpi yang menggiurkan. Banyak warga masyarakat yang rela membayarkan uangnya beratus ribu atau jutaan rupiah sekadar untuk mewujudkan impian. Bahwa kemudian mimpi indah itu tidak terwujud, adalah kenyataan lain yang tidak pernah disesali.

Terlepas dari keberhasilan sejumlah lembaga kursus berkembang menjadi industri jasa yang cukup menjanjikan, masih lebih banyak lembaga kursus yang berjalan terseok-seok. Begitu banyak kursus yang hidupnya hanya seumur jagung. Menurut pengurus Hipki (Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia) anggota mereka mencapai 25.000 lembaga kursus yang terbagi dalam 10 rumpun dengan 160 jenis keterampilan. Berapa jumlah sebenarnya kursus yang ada di Indonesia mungkin tidak akan pernah terjawab karena demikian banyak kursus yang berdiri dan ditutup dalam waktu relatif singkat.

Berdasarkan fungsinya, jenis-jenis lembaga kursus itu dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu: pertama, sejenis Bimbingan Tes yang bertujuan meningkatkan kemampuan belajar melalui pelajaran tambahan untuk bidang-bidang tertentu seperti IPA, matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain dengan sasaran untuk semua pelajar SD-SMTA. Tapi ada yang khusus untuk pelajar pada tingkat tertentu saja, misalnya kelas III SMTA yang akan mengikuti tes UMPTN.

Jenis kedua adalah Kursus-kursus Keterampilan yang bertujuan memberikan atau meningkatkan keterampilan mengetik, kecantikan, bahasa asing, akuntansi, montir, menjahit, sablon, babysitter, dan lain-lain. Sasaran lembaga ini mayoritas adalah para lulusan SMP dan SMTA yang memerlukan sertifikat keterampilan untuk mencari kerja.

Jenis ketiga adalah Pengembangan Profesi, seperti kursus sekretaris atau humas perusahaan, akuntan publik, kepribadian, dan lain-lainnya. Sasarannya tamatan SMTA sampai perguruan tinggi, dari yang belum bekerja sampai yang sudah bekerja, namun ingin meningkatkan profesionalismenya. Jenis ketiga ini lebih ke arah pembentukan image dalam masyarakat, bukan hanya sekadar memberikan keterampilan teknis saja. Karena itu dari segi waktu pelaksanaan kursus lebih panjang (antara enam bulan sampai dua tahun).

Selain banyak dan beragamnya jenis lembaga kursus, pembinaan terhadap lembaga ini sering menjadi masalah. Dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan luar sekolah selama ini sangat minim. Padahal lembaga kursus membutuhkan dukungan yang lebih besar agar bisa berkembang, terutama menghadapi era global di mana akan terbuka peluang bagi lembaga-lembaga kursus asing masuk ke Indonesia. Hal ini ditambah dengan kenyataan bahwa selama ini ada kesan lembaga kursus diperebutkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Tenaga Kerja. Akibatnya, dalam pembinaan maupun perizinan terjadi tumpang-tindih antara keduanya.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah kemudian mengeluarkan ketentuan baru. Kebijakan baru di bidang pendidikan dan pelatihan ini memberikan penegasan tentang perbedaan antara kursus yang berada di bawah wewenang Departemen P dan K dan latihan kerja yang berada di bawah Departemen Tenaga Kerja. Kursus adalah pendidikan luar sekolah yang program-programnya diadakan untuk mereka yang belum ada kejelasan tempat kerja yang akan menampung. Sedangkan pelatihan kerja adalah pendidikan pelatihan untuk mengisi lowongan kerja tertentu.

Menyusul dikeluarkannya ketentuan baru dalam pendidikan dan pelatihan ini, akan segera dilakukan standardisasi dan akreditasi untuk jenis-jenis kursus tertentu. Badan akreditasi kursus ini akan terdiri dari unsur-unsur Departemen P dan K, asosiasi profesi, dan industri. Namun demikian, sulit diharapkan akreditasi dapat menjangkau seluruh lembaga kursus yang jenisnya berbagai macam, mulai dari kursus sekretaris hingga kursus membuat kue. Dari sekitar 25.000 lembaga kursus, lebih separuhnya masih tergolong lembaga kursus kecil. Sudah sepantasnya kursus tidak dianaktirikan lagi dalam sistem pendidikan nasional. Dengan keanekaragamannya, lembaga ini mempunyai sifat dan tujuan yang sama, yakni sebagai penunjang atau pelengkap dari sistem persekolahan yang ada. Sebagai pemacu karier bagi yang sudah bekerja, dan sebagai bekal keterampilan bagi yang belum bekerja. Intervensi pemerintah dalam batas-batas tertentu memang diperlukan, khususnya untuk memacu mutu tenaga pengajar di lembaga-lembaga tersebut.

A. Visi

Menghasilkan tenaga kependidikan PLS profesional yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif serta berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai-nilai akademik, moral-etik dan budaya bangsa.

B. Misi

1. Memberikan layanan pendidikan akademik-profesional berkualitas untuk menghasilkan tenaga kependidikan profesional PLS sesuai dengan jumlah, kualitas, dan relevansinya dengan kebutuhan pembangunan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan model-model inovatif di bidang pengelolaan institusi, program, dan pembelajaran dalam PLS, serta pemberdayaan masyarakat.

3. Memberikan layanan bimbingan, penyuluhan, dan pendampingan inovatif kepada warga masyarakat di bidang pengelolaan institusi, program, dan pembelajaran dalam PLS, serta pemberdayaan masyarakat

C. TUJUAN

1. Menghasilkan tenaga kependidikan profesional PLS yang memiliki kemampuan mengelola institusi, program, dan pembelajaran dalam PLS, dan memberdayakan masyarakat, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat nasional dan global.
2. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi PLS berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi, dan budaya bangsa.
3. Menyebarluaskan dan memberikan layanan pendidikan inovatif kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan.

D. KURIKULUM

Kompetensi Lulusan

Kurikulum program Strata Satu (S1) Jurusan PLS dikembangkan berdasarkan pendekatan kompetensi. Dalam arti pengembangan kurikulum didasarkan pada seperangkat pengetahuan, keahlian, sikap, dan nilai yang harus dikuasai oleh lulusan agar mampu melakukan tugas-tugas profesional di dalam mengelola institusi, program, dan pembelajaran dalam PLS serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan kurikulum tersebut Jurusan PLS di samping berupaya membekali lulusan di bidang kompetensi profesional dan akademik yang bersifat generik, juga membekali kompetensi spesifik (optional) yang digunakan untuk menerapkan kompetensi profesional dan akademik secara utuh. Kompetensi spesifik yang dimaksud yaitu: (a) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini; (b) Pengembangan Sumberdaya Manusia; dan (c) Pemberdayaan Masyarakat. Apabila unsur-unsur kompetensi profesional dan akademik tersebut dimasukkan ke dalam rumpun atau standar kompetensi, maka akan tampak sebagai berikut:

Penguasaan Bidang Ilmu Dasar PLS

1.
 1. Menguasai wawasan ilmu pendidikan untuk memahami dan mengembangkan institusi, program, dan pembelajaran.
 2. Menguasai wawasan ilmu-ilmu sosial untuk memahami masyarakat dan mengembangkan institusi, program, dan pembelajaran.
 3. Menguasai penelitian dan pengembangan untuk mengkaji dan mengembangkan institusi, program, dan pembelajaran.
 4. Menguasai manajemen pendidikan untuk mengelola institusi, program, dan pembelajaran.

Pemahaman Karakteristik Peserta Didik

1. Menguasai karakteristik psikologis dan sosiologis peserta didik
2. Memahami kebutuhan dan minat belajar peserta didik
3. Memahami perilaku belajar peserta didik

Penguasaan Bidang Keahlian

Mampu Mengelola Institusi PLS

1.
 1. Menguasai pengelolaan personel pendidikan
 2. Menguasai pengelolaan biaya dan sumber pembiayaan pendidikan
 3. Menguasai pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan

Mampu Mengelola Program PLS

1. Menguasai pengelolaan kurikulum
2. Menguasai pengelolaan bahan belajar
3. Menguasai pengelolaan pendidik

4. Menguasai pengelolaan peserta didik
5. Menguasai pengelolaan sistem penyajian program
6. Menguasai pengelolaan pemasaran program
7. Menguasai pengelolaan pembeayaan program
8. Menguasai pengelolaan monitoring, evaluasi, dan supervisi program

Mampu Mengelola Pembelajaran

1.

1. Mampu merancang pembelajaran
2. Mampu melaksanakan pembelajaran
3. Mampu mengevaluasi pembelajaran

Pengembangan Kepribadian dan Keprofesionalan

1. Menguasai proses dan hasil perubahan sosial dan perubahan terencana
2. Menguasai wawasan pengembangan profesi
3. Menguasai wawasan multikulturalisme
4. Menguasai wawasan teknologi informasi

Struktur Kurikulum

Kurikulum Program Strata Satu Jurusan PLS terdiri atas 4 (empat) komponen mata kuliah, yaitu: Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPB), Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB), Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).

1. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
2. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan.
3. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) adalah sekelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berkarya seseorang agar mampu hidup mandiri. Matakuliah Keahlian Berkarya diarahkan pada tiga program spesialisasi keahlian, dan disajikan mulai semester V (lima) agar mahasiswa mampu mengarahkan belajarnya sendiri. Tiga program spesialisasi yang ditawarkan yaitu: (a) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, (b) Pengembangan Sumberdaya Manusia, dan (c) Pemberdayaan Masyarakat.
4. Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan oleh seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
5. Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan oleh seseorang untuk dapat memahami kaidah kehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya

Permasalahan yang di hadapi Pendidikan Luar Sekolah

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan luar sekolah dewasa ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Pendidikan Luar Sekolah belum mendapat pemahaman dan perhatian yang proporsional dengan pendidikan sekolah, baik berkenaan dengan peraturan perundangan

maupun dukungan anggaran sehingga pemerataan pelayanan PLS bagi masyarakat diberbagai lapisan dan diberbagai daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Kedua, masih terbatasnya jumlah dan mutu tenaga profesional pada institusi PLS di tingkat pusat dan daerah dalam mengelola, mengembangkan dan melembagakan PLS.

Ketiga, masih terbatasnya sarana dan prasarana PLS baik yang menunjang penyelenggaraan maupun proses pembelajaran PLS.

Keempat, ketergantungannya penyelenggaraan kegiatan PLS di lapangan pada tenaga sukarela sehingga tidak ada jaminan kesinambungan pelaksanaan program PLS.

Kelima, masih relatif rendahnya partisipasi/peranserta masyarakat dalam memprakarsai penyelenggaraan dan pelebagaan PLS.

Dengan memperhatikan permasalahan yang masih dihadapi dewasa ini dalam penyelenggaraan PLS, maka tantangan pembangunan PLS untuk kurun waktu lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam kaitannya dengan meningkatkan perluasan dan pemerataan, adalah bagaimana penyelenggaraan pendidikan luar sekolah yang terdiri dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pemberantasan buta aksara, pendidikan berkelanjutan, pendidikan perempuan dan dukungan terhadap pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih meluas dan merata sehingga lebih mampu menampung dan menjangkau warga masyarakat lebih banyak dari yang selama ini telah dijangkau.

Kedua, dalam kaitannya dengan mutu dan relevansi, adalah bagaimana pendidikan luar sekolah diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas sehingga mampu mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, dan dapat memenuhi pendidikan selanjutnya serta menciptakan dan memenuhi lapangan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar.

Ketiga, dalam kaitannya dengan penataan sistem manajemen pendidikan, baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat adalah bagaimana meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan PLS, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pembiayaannya sehingga pelebagaan penyelenggaraan PLS yang dikelola oleh, dari, dan untuk masyarakat mengakar pada mekanisme perkembangan lingkungan masyarakat